

Pengaruh Inflasi, Belanja Daerah dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Surabaya Tahun 2021–2024

Akbar Fadli Sabil *¹

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*e-mail: akbarfadlisabil03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, Belanja Daerah, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Surabaya selama periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda berdasarkan data sekunder dari BPS, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, dan JDIH. Variabel independen yang digunakan meliputi inflasi tahunan (X_1), Belanja Daerah (X_2), dan upah minimum kota (X_3), sedangkan variabel dependen adalah tingkat pengangguran terbuka (Y). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap TPT ($F = 6733.550$; $sig. = 0.000$). Namun, secara parsial hanya Belanja Daerah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT ($t = -36.197$; $sig. = 0.000$), sedangkan inflasi dan upah minimum tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Koefisien determinasi ($R^2 = 0.908$) menunjukkan bahwa 90,8% variasi TPT dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran kebijakan fiskal, khususnya peningkatan realisasi Belanja Daerah, dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan menekan tingkat pengangguran di wilayah perkotaan.

Kata kunci: Inflasi, Upah minimum, Belanja Daerah dan Pengangguran Terbuka

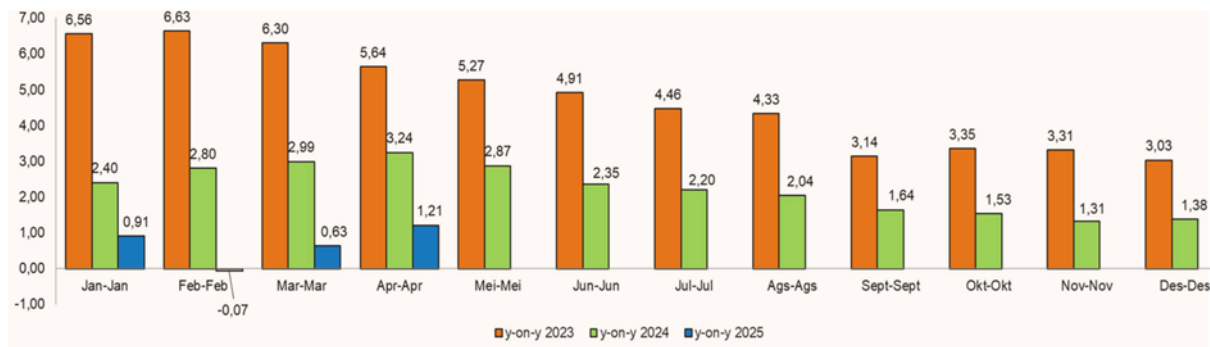
Abstract

This study aims to analyze the effects of inflation, regional government expenditure, and minimum wages on the open unemployment rate (TPT) in Surabaya City during the period 2021–2024. A quantitative approach was employed using multiple linear regression analysis based on secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), the Department of Manpower of East Java Province, and the Regional Legal Documentation and Information Network (JDIH). The independent variables consist of annual inflation (X_1), regional government expenditure (X_2), and the city minimum wage (X_3), while the dependent variable is the open unemployment rate (Y). The results reveal that, collectively, the three variables have a significant effect on TPT ($F = 6733.550$; $p = 0.000$). However, the partial analysis shows that only regional government expenditure exhibits a significant negative effect on TPT ($t = -36.197$; $p = 0.000$), whereas inflation and minimum wages do not demonstrate statistically significant influences. The coefficient of determination ($R^2 = 0.908$) indicates that 90.8% of the variation in TPT is explained by the three variables. These findings underscore the critical role of fiscal policy particularly increased realization of regional government expenditure in fostering job creation and reducing unemployment levels in urban areas.

Keywords: Inflation, Minimum wage, Regional government expenditure, Open unemployment rate

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang tidak dapat dihindari dalam sistem perekonomian modern dan selalu menjadi isu penting dalam kebijakan makroekonomi. Laju inflasi yang tinggi berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, serta mengganggu stabilitas pembangunan nasional (Moridu et al., 2022). Menurut Suseno (2009), inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Namun, tidak setiap kenaikan harga menunjukkan inflasi, melainkan harus terjadi secara berkelanjutan dan berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, inflasi merupakan indikator penting untuk menilai stabilitas perekonomian suatu negara maupun daerah. Adapun perbandingan kondisi inflasi di Surabaya dari dalam 3 tahun terakhir (2023-2025) disajikan sebagai berikut.



Gambar 1. Tingkat Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) (persen), Januari 2023–April 2025

Sumber : BPS Kota Surabaya (2023)

Gambar 1 menunjukkan pada April 2025, pada tingkat inflasi y-on-y Kota Surabaya sebesar 1,21 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,13 persen. Tingkat inflasi y-on-y untuk April 2024 dan April 2023 masing-masing sebesar 3,24 persen dan 5,64 persen. Tingkat inflasi y-to-d untuk April 2024 dan April 2023 masing-masing sebesar 1,31 persen dan 1,26 persen. Di sisi lain, salah satu masalah utama yang sering kali berkaitan erat dengan inflasi adalah pengangguran, di mana keduanya dijelaskan memiliki hubungan negatif dalam teori Phillips Curve (Daniel et al., 2021). Menurut Doni et al. (2023), pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Secara makroekonomi, tingkat pengangguran dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti inflasi, belanja daerah, dan kebijakan upah minimum (Muhammad, 2023). Belanja daerah, sebagai instrumen kebijakan fiskal, memiliki peran penting dalam meningkatkan permintaan agregat dan memperluas kesempatan kerja.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2021 - 2024

Tahun	TPT Kota Surabaya (%)
2021	6.883
2022	6.200
2023	5.533
2024	4.925

Sumber : BPS (2025)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator utama untuk mengukur besaran tenaga kerja yang tidak terserap. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2023), TPT Kota Surabaya menurun dari 6,12% pada tahun 2018 menjadi 5,86% pada tahun 2019, namun kembali meningkat hingga 7,2% pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengangguran masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah, terutama di wilayah perkotaan padat seperti Surabaya. Pertumbuhan penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja (Ranti et al., 2024). Pengangguran yang tinggi tidak hanya menekan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Tirta & Putri, 2025).

Faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan tenaga kerja adalah upah minimum. Upah Minimum Regional (UMR) dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi pada saat yang sama dapat menekan permintaan tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan produktivitas (Yanda et al., 2022). Berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (2024), UMK Surabaya meningkat dari Rp4.300.479 pada tahun 2021 menjadi Rp4.725.479 pada tahun 2024 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, 2024), yang diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan menekan tingkat pengangguran formal. Peningkatan belanja pemerintah di sektor infrastruktur dan layanan publik terbukti mampu menurunkan pengangguran dalam jangka menengah melalui efek pengganda (multiplier effect) (Cardoso et al., 2025). Dalam konteks daerah, efektivitas belanja pemerintah tergantung pada efisiensi pelaksanaannya serta kemampuan daerah dalam mengelola stimulus fiskal yang diberikan.

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan hasil yang beragam. Salah satunya Hidayati et al. (2025) meneliti hubungan inflasi dan pengangguran di Indonesia melalui pendekatan kurva Phillips menggunakan metode studi pustaka dan data BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia, dimana terdapat fenomena flattening of the Phillips Curve, yaitu penurunan inflasi dan pengangguran secara bersamaan dalam beberapa periode. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika inflasi dan pengangguran di Indonesia semakin dipengaruhi faktor struktural dan eksternal, sehingga penerapan kurva Phillips klasik perlu dikontekstualisasikan. Relevansi penelitian ini memberikan dasar konseptual bahwa hubungan inflasi dan pengangguran tidak selalu linear pada level daerah, sehingga penting untuk diuji dalam konteks wilayah penelitian ini pada periode pascapandemi.

Firmansyah et al. (2024) menganalisis perubahan struktur ekonomi di Provinsi NTB dari 2013-2022 menggunakan data BPS dan indeks Herfindahl-Hirschman. Hasilnya menunjukkan adanya pergeseran dari dominasi sektor pertanian menuju sektor industri pengolahan dan pariwisata, dipicu proyek KEK Mandalika. Penelitian ini menekankan dinamika struktur ekonomi regional yang dapat memengaruhi pasar tenaga kerja dan ketahanan ekonomi daerah. Relevansi bagi penelitian ini, perubahan struktur ekonomi lokal dapat memengaruhi respon pengangguran terhadap inflasi dan kebijakan ketenagakerjaan, sehingga analisis pada wilayah penelitian perlu memperhitungkan kondisi struktural ekonominya.

Tirta & Putri (2025) mengkaji pengaruh IPM, TPT, dan PDRB terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Timur menggunakan regresi data panel periode 2019-2023. Hasilnya menunjukkan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan TPT dan PDRB berpengaruh positif signifikan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata dan peningkatan pengangguran memperburuk kemiskinan. Relevansinya terhadap penelitian ini, variabel pengangguran menjadi indikator penting dalam dinamika ekonomi daerah, sehingga perlu dianalisis hubungannya dengan inflasi, belanja pemerintah, dan kebijakan upah pada periode pemulihan ekonomi.

Safitri et al. (2025) melakukan Systematic Literature Review terhadap kebijakan upah minimum dan dampaknya terhadap ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan upah minimum meningkatkan daya beli pekerja sektor formal, namun menekan sektor informal dan UMKM karena peningkatan biaya tenaga kerja. Kebijakan ini juga mendorong efisiensi industri tetapi memunculkan risiko pengurangan tenaga kerja di sektor skala kecil. Relevansi untuk penelitian ini, kebijakan upah minimum dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, sehingga penting dianalisis dalam model empiris bersama inflasi dan belanja pemerintah.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi hasil empiris mengenai pengaruh inflasi, belanja daerah, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran. Sebagian penelitian menemukan hubungan yang signifikan dan sesuai teori ekonomi klasik, sementara yang lain menunjukkan hasil berbeda tergantung pada kondisi struktural dan konteks wilayah penelitian. Kesenjangan hasil empiris ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya di wilayah perkotaan besar seperti Surabaya yang memiliki struktur ekonomi padat jasa dan industri serta tingkat upah tertinggi di Jawa Timur.

Kota Surabaya, sebagai pusat ekonomi regional, menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks antara pertumbuhan, inflasi, kebijakan fiskal, dan kebijakan ketenagakerjaan. Namun, kajian empiris yang secara simultan menganalisis pengaruh inflasi, belanja daerah, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka pada periode pasca-pandemi (2021–2024) di tingkat kota masih terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada tingkat nasional atau provinsi, tanpa menyoroti karakteristik ekonomi perkotaan seperti Surabaya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, belanja daerah, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya periode 2021–2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap

literatur ekonomi makro daerah serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menekan pengangguran secara berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Inflasi

Inflasi daerah merupakan peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan pada tingkat wilayah tertentu, sehingga mencerminkan dinamika harga di tingkat regional, bukan nasional secara agregat (Prihadyatama & Kurniawan, 2022). Inflasi daerah dipengaruhi struktur ekonomi lokal, karakteristik konsumsi masyarakat, serta kondisi pasar wilayah tersebut (Rizani et al., 2023). Tekanan inflasi di daerah urban umumnya lebih sensitif terhadap aktivitas perdagangan, layanan transportasi, dinamika pasokan bahan pangan, dan perubahan biaya logistik akibat tingginya mobilitas penduduk serta intensitas aktivitas ekonomi (Tarigan, 2025).

Dalam kerangka pengendalian harga, kebijakan nasional melalui Bank Indonesia menetapkan Inflation Targeting Framework untuk menjaga stabilitas harga secara makro, sedangkan pada level wilayah, pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melaksanakan strategi 4K: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif (Marina et al., 2021). Melalui mekanisme tersebut, pengendalian inflasi daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga koordinasi antar-pemerintah daerah, pelaku distribusi, dan otoritas logistik untuk memastikan kelancaran pasokan komoditas strategis (Syafitri et al., 2025).

Secara teoretis, dinamika inflasi daerah berhubungan dengan kerangka kurva Phillips regional, di mana tekanan inflasi dapat berkaitan dengan kondisi pengangguran dan aktivitas ekonomi wilayah dalam jangka pendek (Prihadyatama & Kurniawan, 2022). Namun, hubungan tersebut bersifat tidak konstan karena ekspektasi masyarakat, struktur industri, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja turut mempengaruhi pola tekanan harga. Selain itu, faktor eksternal seperti fluktuasi harga energi global, gangguan rantai pasok, dan volatilitas komoditas pangan turut membentuk tekanan inflasi di tingkat regional (Rahmatullah, 2025). Oleh karena itu, inflasi daerah dapat berkembang berbeda dari rata-rata nasional tergantung pada karakteristik ekonomi wilayah, efektivitas koordinasi kebijakan, dan stabilitas distribusi barang.

Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan, dan menjadi indikator utama untuk melihat keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja (Irawan & Khoirudin, 2024). Secara makroekonomi, hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui Hukum Okun, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi umumnya menurunkan tingkat pengangguran. Di daerah perkotaan, tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti skill mismatch, segmentasi pasar kerja formal-informal, dan tingkat mobilitas antar-sektor (Palawe, 2025). Selain faktor struktural, faktor siklik seperti inflasi, kebijakan fiskal, dan regulasi upah juga berperan dalam menentukan fluktuasi pengangguran. Dengan demikian, analisis tingkat pengangguran perlu dilakukan secara simultan dengan mempertimbangkan variabel inflasi, belanja daerah, dan upah minimum agar memberikan gambaran yang komprehensif terhadap dinamika pasar kerja perkotaan.

Belanja daerah

Anggaran belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Huda et al., 2024). APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi ekonomi melalui belanja publik yang diarahkan pada pelayanan dasar, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal (Putra et al., 2025). Melalui belanja modal dan belanja barang/jasa, pemerintah daerah dapat memperluas permintaan agregat, mendorong investasi publik, serta

menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung melalui proyek pemerintah maupun secara tidak langsung melalui multiplier effect perekonomian daerah (Fatihudin, 2014).

Secara teoritis, belanja pemerintah yang efektif berperan penting dalam menekan tingkat pengangguran melalui peningkatan kegiatan ekonomi lokal dan produktivitas tenaga kerja (Mustari et al., 2025). Dalam konteks daerah, komposisi belanja sangat menentukan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja. Belanja modal (capital expenditure) yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, dan perluasan akses ekonomi memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Aryanto & Handaka, 2017). Sebaliknya, dominasi belanja rutin seperti gaji dan operasional birokrasi dapat menurunkan efisiensi fiskal dan hanya memberikan dampak terbatas terhadap pengurangan pengangguran (Widodo, 2020). Oleh karena itu, efektivitas APBD tidak hanya ditentukan pada besaran alokasi, tetapi juga pada kualitas perencanaan, implementasi, dan orientasi belanja terhadap sektor produktif daerah.

Upah Minimum

Upah minimum ditetapkan untuk menjamin pekerja memperoleh upah yang layak dan mencegah eksploitasi tenaga kerja (Raharjo et al., 2025). Dalam teori ekonomi klasik, kenaikan upah minimum di atas tingkat keseimbangan pasar tenaga kerja dapat menurunkan permintaan tenaga kerja karena peningkatan biaya produksi. Namun, dalam pasar monopsoni, kenaikan upah minimum justru dapat memperluas lapangan kerja karena mengurangi kekuatan tawar tunggal pemberi kerja (Raharjo et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan dampak yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menemukan efek negatif terhadap kesempatan kerja, sementara yang lain menunjukkan dampak yang netral, tergantung pada struktur industri dan elastisitas permintaan tenaga kerja. Di Indonesia, kebijakan upah minimum sering kali berimplikasi pada sektor padat karya dan usaha kecil menengah. Wursten & Reich (2023) menemukan bahwa kenaikan upah minimum dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja di perusahaan kecil, sedangkan Saputra et al. (2025) menunjukkan bahwa dampak negatifnya lebih besar di sektor formal perkotaan dengan produktivitas rendah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh inflasi, belanja daerah, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Surabaya pada periode 2021–2024. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antarvariabel secara objektif dan memberikan dasar statistik untuk menguji hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi pemerintah, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur. Data inflasi dan tingkat pengangguran terbuka diambil dari publikasi BPS seperti Keadaan Ketenagakerjaan Kota Surabaya dan Berita Resmi Statistik, sedangkan data belanja daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kementerian Keuangan. Data upah minimum kota (UMK) Surabaya bersumber dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen meliputi inflasi (X_1), belanja daerah (X_2), dan upah minimum (X_3), sedangkan variabel dependen adalah tingkat pengangguran terbuka (Y). Adapun variabel operasional disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Operasional Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Inflasi (X_1)	Persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada tingkat daerah dalam periode tertentu	Tingkat Inflasi Year-on-Year (YoY)	Rasio (Persentase %)
Belanja Daerah (X_2)	Realisasi pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari APBD	Total Realisasi Belanja Daerah	Rasio (Rupiah)

Upah Minimum (X_3)	untuk menjalankan program pembangunan dan layanan publik Ketetapan pemerintah mengenai batas upah minimum yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja	Upah Minimum Kota (UMK) per tahun	Rasio (Rupiah)
Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)	Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan	TPT (Open Unemployment Rate)	Rasio (Persentase %)

Model analisis yang digunakan disusun dalam bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

dengan keterangan: Y = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); X_1 = Inflasi; X_2 = Belanja daerah; X_3 = Upah Minimum; β_0 = konstanta; β_1 – β_3 = koefisien regresi masing-masing variabel independen; dan ε = error term.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas untuk memastikan validitas model regresi. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan uji F untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap TPT, dan uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS versi 26, dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Hasil analisis diinterpretasikan untuk menjelaskan arah dan kekuatan pengaruh inflasi, belanja daerah, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya selama periode pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Inflasi (y-o-y), Belanja daerah (realisasi, Rp triliun), dan Upah Minimum Kota Surabaya (Rp) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya periode Januari 2021–Desember 2024. Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu uji F (simultan) untuk menguji pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen, uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada TPT.

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.300	3	9.100	6733.550	.000b
	Residual	.059	44	.001		
	Total	27.360	47			

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya (%)
b. Predictors: (Constant), Upah Minimum Kota Surabaya (Rp), Inflasi (y-o-y) Kota Surabaya, Belanja daerah (realisasi. Rp triliun)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 3, diperoleh nilai F hitung sebesar 6733.550 dengan signifikansi $0.000 < 0.05$, yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel Inflasi, Belanja daerah, dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya. Artinya, perubahan dalam ketiga variabel ekonomi makro tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi tingkat pengangguran selama periode penelitian.

Dengan demikian, model regresi yang digunakan dianggap layak (fit) untuk menjelaskan hubungan antarvariabel.

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	10.266	.459		22.369	.000
	Inflasi (y-o-y) Kota Surabaya	.009	.005	.015	1.627	.111
	Belanja daerah (realisasi. Rp triliun)	-.345	.010	-1.013	-36.197	.000
	Upah Minimum Kota Surabaya (Rp)	5.778E-5	.000	.012	.452	.653

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya (%)

Berdasarkan nilai koefisien yang diperoleh pada tabel di atas, maka model estimasi regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TPT = 10.266 + 0.009(Inflasi) - 0.345(Belanja Negara) + 5.778 \times 10^{-5}(Upah Minimum) + e$$

di mana:

- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya (%),
- Inflasi = Inflasi tahunan (y-o-y) Kota Surabaya (%),
- Belanja daerah = Realisasi belanja daerah (Rp triliun),
- Upah Minimum = Upah Minimum Kota Surabaya (Rp),
- e = error term.

Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial, Belanja daerah (realisasi) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT dengan nilai t hitung = -36.197 dan signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal ini menandakan bahwa peningkatan realisasi belanja daerah berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran, kemungkinan melalui penciptaan lapangan kerja baru dari proyek dan program pemerintah.

Sebaliknya, variabel Inflasi (y-o-y) dan Upah Minimum Kota Surabaya tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT karena nilai signifikansinya masing-masing 0.111 dan 0.653 (> 0.05). Ini menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi dan perubahan upah minimum selama periode 2021–2024 tidak secara langsung memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Surabaya. Hal tersebut dapat terjadi karena efek inflasi terhadap pengangguran baru terasa dalam jangka panjang, sedangkan kenaikan upah minimum mungkin diimbangi oleh produktivitas tenaga kerja atau kebijakan perusahaan.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1 Regression	.909 ^a	.908	.908	.03676

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Kota Surabaya (Rp), Inflasi (y-o-y) Kota Surabaya, Belanja daerah (realisasi. Rp triliun)

b. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya (%)

Nilai R Square sebesar 0.908 menunjukkan bahwa 90.8% variasi perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu Inflasi, Belanja daerah, dan Upah Minimum Kota Surabaya. Hanya 9.2% sisanya yang dijelaskan oleh

faktor lain di luar model, seperti kondisi investasi, kebijakan industri, atau dinamika pasar tenaga kerja. Nilai Adjusted $R^2 = 0.908$ mengindikasikan model ini sangat kuat dan memiliki tingkat kesesuaian tinggi terhadap data empiris yang digunakan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel inflasi, belanja daerah, dan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Surabaya selama periode 2021–2024. Namun secara parsial, hanya belanja daerah yang terbukti berpengaruh signifikan dengan arah negatif, sedangkan inflasi dan upah minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap TPT. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika pengangguran di Surabaya lebih sensitif terhadap kebijakan fiskal dibandingkan dengan faktor harga atau upah tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan pandangan Keynesian yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui belanja publik dalam mendorong kegiatan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran (Jumayeva, 2025).

Variabel belanja daerah memiliki koefisien negatif dan signifikan ($B = -0.345$; $\text{sig} = 0.000$), yang berarti bahwa setiap kenaikan realisasi belanja daerah sebesar Rp 1 triliun berpotensi menurunkan TPT sekitar 0.345 persen. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan alokasi fiskal, terutama pada sektor padat karya seperti infrastruktur, pendidikan, dan sosial, mampu menciptakan lapangan kerja baru di tingkat daerah (Imsar & Zaman, 2024). Menurut penelitian Rahmi et al. (2024), pengeluaran pemerintah daerah memiliki efek multiplier terhadap penyerapan tenaga kerja karena mendorong permintaan terhadap barang dan jasa lokal. Dalam konteks Surabaya, kebijakan fiskal yang ekspansif dari pemerintah pusat maupun daerah selama pemulihan pasca-pandemi terbukti mempercepat pemulihan pasar kerja dan menurunkan angka pengangguran terbuka.

Sebaliknya, variabel inflasi (y-o-y) memiliki nilai koefisien positif ($B = 0.009$) dengan signifikansi 0.111 (> 0.05), sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap TPT. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan inflasi selama periode penelitian tidak secara langsung menyebabkan peningkatan pengangguran di Surabaya. Dalam teori ekonomi, hubungan antara inflasi dan pengangguran dijelaskan melalui kurva Phillips, di mana dalam jangka pendek keduanya memiliki hubungan negatif, tetapi dalam jangka panjang cenderung netral (Hidayati et al., 2025). Surabaya sebagai kota metropolitan dengan sektor jasa dan perdagangan yang kuat, relatif lebih mampu menyesuaikan diri terhadap fluktuasi harga tanpa mengorbankan penyerapan tenaga kerja. Penelitian oleh Nasution et al. (2025) juga menunjukkan bahwa inflasi daerah cenderung terkendali dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran karena stabilitas harga yang dijaga melalui kebijakan moneter dan distribusi logistik yang baik.

Sementara itu, variabel upah minimum memiliki koefisien positif sangat kecil ($B = 5.778E-5$) dengan nilai signifikansi 0.653 (> 0.05), menandakan bahwa kenaikan upah minimum di Surabaya tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini dapat dijelaskan karena sebagian besar sektor industri di Surabaya memiliki produktivitas yang relatif tinggi dan mampu menyerap kenaikan upah tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja. Menurut Ramadhany (2021), pengaruh kenaikan upah terhadap pengangguran bergantung pada elastisitas tenaga kerja di sektor formal jika produktivitas meningkat seiring dengan kenaikan upah, maka dampak negatifnya terhadap kesempatan kerja menjadi minimal. Selain itu, keberadaan sektor informal yang luas di Surabaya memberikan fleksibilitas bagi pasar tenaga kerja untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak dari kebijakan upah minimum.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil studi Purwanti & Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah merupakan faktor paling dominan dalam menurunkan pengangguran, terutama pada periode pemulihan ekonomi. Dalam konteks pasca-COVID-19, peningkatan realisasi belanja publik untuk proyek infrastruktur dan bantuan sosial di Kota Surabaya berperan penting dalam menstimulasi aktivitas ekonomi lokal. Di sisi lain, tidak signifikannya pengaruh inflasi dan upah minimum menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi di Surabaya berhasil dijaga, serta kebijakan pengupahan telah diterima oleh pelaku usaha tanpa

mengganggu penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara aspek fiskal dan ketenagakerjaan yang mendukung terciptanya pasar kerja yang inklusif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan daerah. Pemerintah Kota Surabaya dapat terus memperkuat kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan dan berorientasi tenaga kerja, misalnya melalui peningkatan belanja modal dan program pemberdayaan UMKM yang padat karya. Selain itu, koordinasi antara kebijakan upah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja perlu dijaga agar tidak menimbulkan tekanan pada sektor usaha. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa menjaga inflasi tetap stabil merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pengendalian inflasi, efisiensi belanja publik, dan kebijakan upah yang adaptif menjadi kunci untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara berkelanjutan di Surabaya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel inflasi, belanja daerah, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya periode 2021–2024. Namun, pengujian parsial mengungkap bahwa hanya belanja daerah yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Peningkatan realisasi belanja daerah terbukti efektif dalam menurunkan TPT, khususnya melalui perluasan lapangan kerja pada sektor padat karya dan peningkatan permintaan agregat. Hasil ini mendukung teori Keynesian yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran, terutama pada periode pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.

Sementara itu, variabel inflasi dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Tidak signifikannya pengaruh inflasi menunjukkan bahwa fluktuasi harga di Surabaya masih dalam batas terkendali dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi secara substansial. Stabilitas harga yang terjaga dapat dikaitkan dengan efektivitas kebijakan moneter dan distribusi logistik di wilayah perkotaan. Di sisi lain, kenaikan upah minimum yang tidak signifikan terhadap pengangguran menandakan adanya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas sektor usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku industri di Surabaya relatif mampu menyesuaikan kenaikan upah tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja secara signifikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal memegang peran utama dalam pengendalian pengangguran di daerah perkotaan seperti Surabaya. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat program belanja publik yang bersifat produktif, khususnya pada sektor infrastruktur dan pemberdayaan UMKM, yang dapat menciptakan efek berganda terhadap perekonomian. Selain itu, kebijakan pengupahan perlu tetap disinergikan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar tidak menimbulkan distorsi di pasar kerja. Dengan menjaga stabilitas inflasi, memperkuat efisiensi belanja publik, dan mengatur kebijakan upah yang adaptif, diharapkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya dapat terus ditekan secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, W., & Handaka, R. D. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 2(2), 52–63.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kota Surabaya dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). *Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,61 persen di Jawa Timur*. <https://surabayakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjc1IzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--dan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html>
- BPS Kota Surabaya. (2023). *April 2025, inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Surabaya sebesar 1,21 persen*. <https://surabayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/02/345/april-2025-->

inflasi-year-on-year--y-on-y--kota-surabaya-sebesar-1-21-persen.html

- Cardoso, D., Carvalho, L., Lima, G. T., Nassif-Pires, L., Rugitsky, F., & Sanches, M. (2025). The Multiplier Effects of Government Expenditures on Social Protection: A Multi-country Study. *Development and Change*, 56(1), 172–224.
- Daniel, S. U., Israel, V. C., Chidubem, C. B., & Quansah, J. (2021). Relationship between inflation and unemployment: Testing Philips curve hypotheses and investigating the causes of inflation and unemployment in Nigeria. *Traektoriâ Nauki= Path of Science*, 7(9), 1013–1027.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. (2024). *Laporan Ketenagakerjaan 2024*. Disnakertrans Jatim.
- Doni, A. H., Alfiona, F., Andespa, W., & Al-Amin, A.-A. (2023). Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Kovensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 2(3), 1–10.
- Fatihudin, D. (2014). Kontribusi Investasi Swasta Dan Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertambahan PDRB, Serapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Empat Kabupaten Di Pulau Madura. *Proceeding The 7th CCFB and Doctoral Colloquium*, 1, 28.
- Firmansyah, M., Sahri, S., Irwan, M., & Maryam, S. (2024). Perubahan Struktur Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 12–19.
- Hidayati, A. N., Sa'adah, B. C. P., Firnanda, D. K., Ningrum, L. S. S., & Azizah, N. (2025). Analisis Dinamika Inflasi Dan Pengangguran Di Indonesia Berdasarkan Teori Kurva Phillips. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 75–85.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201.
- Imsar, I., & Zaman, M. Q. (2024). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 14(2), 42–48.
- Irawan, T., & Khoirudin, R. (2024). The Impact of Human Development Index, Minimum Wage, Labor Force Participation Rate, and Open Unemployment Rate on Economic Growth. *Journal of Management Studies and Development*, 3(1), 56–68.
- Jumayeva, Z. (2025). Keynesian Theory of Economic Growth: State Intervention and Economic Stability. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 744–747.
- Marina, I., Andayani, S. A., & Sumantri, K. (2021). Pendampingan Program Pengendalian Inflasi Daerah Pada Klaster Cabai Merah. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 775–779.
- Moridu, I., Munandar, A., Wurarah, R. M., Lotte, L. N. A., & Aziz, R. M. (2022). Analysis of Inflation, Purchasing Power, and Economic Growth during a Pandemic. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(6), 2489–2496.
- Muhammad, A. A. (2023). Examining the relationship among unemployment, inflation, and economic growth. *Journal of Business and Economic Options*, 6(2), 23–31.
- Mustari, N. R. P., Hutasoit, G. P. K., Yanti, P. R., & Afifah, D. F. (2025). Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal: Isu Pengangguran. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 314–333.
- Nasution, A. S., Amanda, E. L., Pasaribu, R. P., Fajri, M. Y., & Rinaldi, M. (2025). Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah. *Jurnal Media Akademik*, 3(6).
- Palawe, J. (2025). *Ekonomi Pembangunan*. Jaka Frianto Putra Palawe.
- Prihadyatama, A., & Kurniawan, H. A. (2022). Studi literatur roadmap pengendalian inflasi daerah di indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 238–264.
- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. *Ecoplan*, 4(1), 32–44.
- Putra, S. K., Setiani, W., Astuti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam

- Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 408–416.
- Raharjo, M. S. P., Borman, S., Sidarta, D. D., & Soerodjo, I. (2025). Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Upah Minimum Di Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 19(11), 6337–6348.
- Rahmatullah, A. (2025). Strategi Berkelanjutan Pengendalian Inflasi Pangan di Banjarmasin: Integrasi Pendekatan Internal dan Eksternal. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 8(1), 102–116.
- Rahmi, U. A., Pratiwi, W. D., Utomo, D. K. S., Gusadi, M. H., & Fachrurrazi. (2024). Dampak pengeluaran wisatawan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan model input-output. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(2), 683–696.
- Ramadhany, M. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Migrasi Keluar masyarakat Kabupaten/kota Di Pulau Madura. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Ranti, L. R., Astrid, A., Yanti, D., & Barella, Y. (2024). Pengaruh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(3), 222–235.
- Rizani, A., Norrahman, R. A., Harsono, I., Yahya, A. S., & Syifa, D. M. (2023). Efek Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2).
- Safitri, S. N., Oktaviani, T., Fahrul, M., Mawardani, F., Idayati, I., & Junursa, W. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia. *ESCAF*, 388–405.
- Saputra, M. B. D., Makarim, N. R. N., Al Ghiffary, M. R., & Ismail, M. S. (2025). Transformasi Ekonomi Dalam Proses Urbanisasi: Studi Kasus Kota Makassar. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03), 4889–4898.
- Syafitri, A. A., Sunarny, R., & Kusdinar, Y. H. (2025). Peran Kebijakan Moneter dalam Stabilitas Harga Barang Konsumsi: Implikasi bagi Manajemen Rantai Pasok Ritel. *Sistemik: Jurnal Ilmiah Nasional Bidang Ilmu Teknik*, 13(1), 22–30.
- Tarigan, J. S. (2025). Analisis Dampak Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat Perkotaan. *Circle Archive*, 1(7).
- Tirta, B. W., & Putri, R. N. H. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(2), 1500–1510.
- Widodo, S. (2020). *Efisiensi & efektivitas belanja pegawai, barang & modal* (Issue 4).
- Wursten, J., & Reich, M. (2023). *Small businesses and the minimum wage* (Issues 102–23).
- Yanda, F. A., Saleh, S. E., & Dai, S. I. S. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 101–111.